

**EFEKTIFITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI
KOTA MAKASSAR
(Studi kasus Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas 2015-2018)**



Draf Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH:

HAERULLAH
NIM: 10400114237

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haerullah
NIM : 10400114237
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 21 Januari 1996
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/Program : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Kel Lakkang
Judul : Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Haerullah
NIM: 10400114237

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “EFEKTIFITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR (Studi kasus Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas 2015-2018)”, yang disusun oleh Haerullah, NIM: 10400114237, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 30 Juli 2018 M
17 Dzulkaidah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Jumadi, M.H.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Munir Salim, M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. M Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Ashabul Kahpi, S.Ag., M. H.	(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul yang telah membimbing umatnya kearah kebenaran yang diridhoi oleh Allah swt. dan keluarga serta parasahabat yang setia kepadanya. Alhamdulillah berkat hidayah dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas dan penyusunan skripsi ini, yang berjudul : **“Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak menjumpai hambatan dan tantangan namun kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang yang terkasilah yang penulis jadikan acuan untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian Pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu penulis mengharapkan motivasi, dukungan, semangat, kritik, dan saran, yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujud kepada Allah Swt. yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya dan juga kepada kedua orang tua saya Harifuddin dan Ibunda Harlina yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan, dan mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini, dengan doa yang tiada henti-hentinya serta dukungan-dukungannya baik secara moril maupun materil.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari M.Si., dan Prof. Dr. H. Mardan sebagai Wakil Rektor I, M.Ag, Prof. Dr. Lomba Sultan, M.A sebagai Wakil Rektor II, Prof. Siti Aisyah, MA., PhD sebagai Wakil Rektor III dan Prof. Dr. Hamdan Juhannis selaku Wakil Rektor IV atas segala fasilitas yang diberikan.
2. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag selaku pembantu Dekan I, Bapak Dr. Hamsir, S.H M.H selaku pembantu Dekan II, Bapak Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag selaku pembantu Dekan III. Serta staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar.
3. Istiqamah, S.H. M.H., dan Rahman Syamsuddin, S.H. M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan para stafnya.
4. Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag., dan Ashabul Kahpi, S.Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
5. Kepada keluarga besar saya yang tidak henti-hentinya mendoakan saya agar dipermudah dari segala urusan dalam mencapai gelar sarjana secepat mungkin, khususnya kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan yang telah banting tulang mencari rezki untuk membiayai kuliah saya.
6. Seluruh dosen, kepala perpustakaan, pegawai serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.
7. Kepada Kepala Lembaga rehabilitasi LPAIC beserta jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak.

8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Ilmu Hukum 2014 (IH.E) yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini dan terima kasih juga kepada kakanda serta adik-adik Jurusan Ilmu Hukum disemua angkatan.
9. Yulianti yang juga banyak menuntut supaya cepat meraih gelar Sarjana Hukum yang telah setia menemani serta memberi semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsi baik moral maupun material kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi ini selesai.

Akhirnya hanya kepada Allah jugalah penulis serahkan segalanya dan harapan penulis semoga tulisan ini bermanfaat bagi pengajaran motivasi. Semoga bantuan ini, bernilai ibadah di sisi Allah swt.dan mendapat pahala yang setimpal.

Makassar, Juli 2018

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</u>	ii
<u>PENGESAHAN SKRIPSI</u>	iii
<u>KATA PENGANTAR</u>	iv
<u>DAFTAR ISI</u>	v
<u>ABSTRAK</u>	x
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	8
C. <u>Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus</u>	8
D. <u>Kajian Pustaka</u>	8
E. <u>Tujuan Dan Manfaat Penelitian</u>	11
<u>BAB II TINJAUAN TEORITIS</u>	13
A. <u>Narkotika</u>	13
B. <u>Tindakan Pidana</u>	30
C. <u>Jenis Tindakan Pidana</u>	34
D. <u>Rehabilitas</u>	40
E. <u>Efektifitas</u>	48
<u>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</u>	53
A. <u>Jenis dan Lokasi Penelitian</u>	53
B. <u>Metode Pendekatan</u>	53
C. <u>Jenis dan Sumber Data</u>	54
D. <u>Metode Pengumpulan Data</u>	54
E. <u>Instrumen Penelitian</u>	55
F. <u>Teknik Pengumpulan Data</u>	55
G. <u>Analisi Data</u>	56
<u>BAB IV PEMBAHASAN</u>	57
A. <u>Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika</u>	57
B. <u>Faktor Yang Menghambat Rehabilitasi Yang Dilakukan LPAIC Makassar</u>	76
<u>BAB V PENUTUP</u>	80
A. <u>Kesimpulan</u>	80
B. <u>Saran</u>	80

<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	82
<u>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</u>	84
<u>LAMPIRAN – LAMPIRAN</u>	85



ABSTRAK

Nama : Haerullah

Nim : 10400114237

Judul : Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Makassar.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar, dengan sub masalah: 1) Bagaimana efektifitas rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. 2) Faktor yang menghambat program rehabilitasi Lembaga LPAIC Kota Makassar?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan yang bersifat analisis deskriptif dan wawancara lapangan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, pendekatan ini dipakai karena dapat memberikan informasi yang dianggap relevan untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Selain itu sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat dimana Lembaga Rehabilitasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam program rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi alam dan terapi sosial untuk memulihkan para pecandu narkotika. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu atau pengguna narkotika, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga dari Anak pengguna narkotika bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pengguna narkotika tidak dipenjara (Hukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa anaknya ke Lembaga Rehabilitasi atau Kantor BNN dan takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkotika, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah. Anggaran cenderung juga menjadi penghambat Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar, dimana anggaran yang diberikan tidak mampu membiayai banyaknya sumber daya manusia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Implikasi penelitian ini diharapkan kepada pemerintah, pendidik di sekolah dan kepolisian serta masyarakat untuk mendidik dengan baik anak atau keluarga agar terhindar dari pergaulan bebas. Oleh karena itu perlu adanya bantuan secara fisik maupun moral untuk membantu para remaja agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang disekitarnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak, masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan banyak keseimbangan, kebingungan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.¹

Hukum pidana itu sendiri merupakan bagian dari hukum publik dimana hukum pidana itu sendiri berperan dalam tata hukum bernegara. Aturan hukum pidana terdapat dalam Buku II dan III KUHP yang membahas tentang kejahatan dan pelanggaran, tapi seiring berjalannya waktu kejahatan semakin pesat berkembang sehingga ada beberapa delik khusus yang mengatur diluar KUHP seperti UU Narkotika. Narkotika merupakan salah satu musuh besar bagi Negara yang harus diberantas walaupun bukan kasus tentang korupsi

¹Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (cet. 5; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.4

namun permasalahan narkoba juga sangatlah penting untuk dimusnahkan di Negara Indonesia terutama di Kota Makassar itu sendiri. Di era modrn ini, Indonesia tidak lagi menjadi sebuah Negara transit tapi sebagai daerah yang dikenal pemasar narkoba yang potensial bahkan kini Indonesia dianggap sebagai pengguna ekstasi. Dapatlah dibayangkan dari penyalahgunaan narkoba tidak saja terhadap pribadi tetapi memiliki dampak negative terhadap gangguan kepada masyarakat. Pada umumnya korban pecandu narkoba ini adalah kaum remaja yang salah satunya paling ditakutkan dalam kehidupan bermasyarakat adalah rusaknya pergaulan remaja yang mempunyai keingintahuan yang besar mengenai ancaman yang bisa merusak dirinya sendiri yakni diawali dengan coba-coba. Berawal dari perilaku keingintahuan itulah yang membuat remaja mengalami ketergantungan. Dan ada juga yang beralasan narkoba sebagai pelarian atau bentuk protes dari orang tua. Remaja yang kecanduan seperti ini perlu diberikan rehabilitasi agar dapat kembali kelingkungannya masing-masing selaknya remaja yang produktif bagai generasi penerus bangsa.

Bila dihubungkan dengan bangsa dan Negara, Indonesia merupakan tempat yang paling mudah dimasuki oleh peredaran gelap narkoba. Permasalahan inilah yang harus disikapi pemerintah karena dapat mengancam kaum generasi penerus bangsa dan terkhusus juga nasib bangsa ditangan kaum pemuda. Maka dari itu pemerintah harus membuat aturan yang mempersempit ruang gerak peredaran narkoba dengan mengeluarkan Undang-Undang serta peraturan yang mengatur hal-hal yang berkaitan

dengan narkoba dan psikotropika. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Pada hakekatnya manusia hidup pada sebuah kerukunan dalam bermasyarakat yang saling berinteraksi antar golongan.²

Secara normative rehabilitasi diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menindaklanjuti hal tersebut maka dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna kedalam lembaga medis dan sosial. Untuk memperkuat masalah tersebut pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah wajib lapor pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) DI 33 Provinsi. Meskipun banyak peraturan yang dikeluarkan pemerintah namun masih banyak yang pecandu narkoba dalam hal ini efektifitas rehabilitasi belum maksimal.

Ditengah beban kehidupan yang kian berat, hingga kebutuhan ekonomi yang kian meningkat dari hari kehari, patutlah dikhawatirkan dan disesalkan, karena dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, maka telah ditemukan banyaknya masyarakat yang tergolong miskin yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan norma-norma hukum, yakni menjadi pengedar narkoba karena dianggap sebagai jalan mudah meraih keuntungan yang lumayan besar. Peredaran narkoba saat ini yang lagi marak menjadi

² Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Cet.1; Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h.10

ketakutan yang sangat besar telah dirasakan oleh masyarakat karena peredarannya hingga masuk kelingkungan tempat tinggal mereka, hingga orang miskin pun dengan mudah dapat menikmati narkoba untuk pemakaian awal. Begitu sudah ketagihan barulah pengedar akan menjeratnya denganyang sebenarnya tidak terjangkau yang akibatnya para pecandu yang tidak mampu membeli akan melakukan upaya apa saja, seperti mencuri, merampok, bahkan menghabisi nyawa orang lain demi memperoleh narkoba.

Cepatnya peredaran narkoba dan banyaknya korban atau calon korban, membuat semua kalangan prihatin dan khawatir. Betapa tidak, baik orangtua maupun semua kalangan merasa terbebani dengan tugas berat ini. Namun, keprihatinan dan kecemasan tersebut tidak harus berlarut-larut. Demi menyelamatkan generasi muda, gendang perang pun ditabuh dimana-mana oleh semua kalangan. Spanduk atau selebaran anti narkoba mulai gencar pula dijang di tempat umum. Semua masyarakat mewaspadaai bahaya peredaran narkoba. Oleh karena itu, muncul organisasi masyarakat, seperti Gerakan Anti Madat (Geram) dan Gerakan Anti Narkoba (Granat). Organisasi ini sangat membantu lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, yakni Badan Narkotika Nasional (BNN).³

Narkotika sebenarnya diperlukan oleh manusia untuk keperluan medis atau pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produk narkotika yang tersedia secara terus-menerus. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

³Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba* (cet. 1; Jakarta Timur: PT Grafindo Media Pratama, 2006), h. 3

narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika melihat fakta yang ada sekarang di Indonesia tidak sedikit yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, baik dari kalangan orang tua, remaja hingga anak-anak, dan menurut hasil pengamatan yang ada, bahwa pihak konsumen pecandu psikotropika rata-rata adalah anak remaja dan golongan pemuda.⁴ Sedangkan kita sama-sama mengetahui bahwa Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras, dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan pada saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas. Salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat

⁴Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11

merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, hal ini tentunya perlu diperhatikan dengan baik, oleh pemerintah, maupun masyarakat luas guna untuk menciptakan generasi-generasi yang berahlak mulia.

Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok dunia hingga korbannya merupakan anak dibawa umur, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba dalam hal ini adalah rehabilitasi. Dimana rehabilitasi narkoba adalah sebuah tingkatan refresif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain itu rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba baik secara medis maupun sosial.

Rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat penting karena dengan sebuah rehabilitasi dapat diketahui apakah suatu aturan tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak ada perlakuan yang berbeda antara pengguna, pengedar, Bandar maupun produsen narkoba. Pengguna atau pecandu narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkoba masih

belum efektif pelaksanaannya. Sebagian besar pecandu narkoba tidak dijatuhi vonis rehabilitasi sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang narkoba melainkan dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam undang-undang narkoba ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba diatur dalam pasal 54, pasal 56, pasal 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Hal yang menarik dalam undang-undang narkoba terdapat dalam pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi.

Setiap penyalahgunaan narkoba untuk yang menggunakan ketentuan pidananya diatur dalam pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang narkoba. Didalam pasal 127 diatur bahwa bagi setiap penyalahguna narkoba diancam dengan pidana penjara sedangkan bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya berfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan. Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan

narkotika dianggap perlu untuk menekan penggunaan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang.⁵

Hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis hingga tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektifitas rehabilitasi terhadap Anak pengguna narkotika di Kota Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat rehabilitasi terhadap Anak pengguna narkotika di Kota Makassar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan penelitiannya pada proses rehabilitasi yang dilakukan untuk para pecandu narkotika dan efektifitas rehabilitasi terhadap pecandu narkotika sesuai dengan Undang-Undang narkotika, ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54, pasal 56, pasal 103, dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam undang-undang narkotika terdapat dalam pasal 103 menyatakan kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

⁵Ibrahim Hikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalaguna Narkotika*, Lampung, 2016, h. 45

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, telah dilakukan pengkajian beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kajian kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menurut Muh Taufik Makaro S.H.MH. dalam bukunya tindak pidana narkoba mengatakan bahwa narkoba apabila dipergunakan secara tepat, baik dosis atau ukuran maupun penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan melebihi dosis ukuran yang benar maka akan menimbulkan kematian, serta tidak stabilnya pertumbuhan tatanan kehidupan sosial di masyarakat, gangguan kesehatan bagi pemakai, bahkan lebih fatal lagi mengakibatkan dengan semakin majunya sarana transportasi dan komunikasi, menimbulkan peredaran narkoba antar Negara dan antar Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaannya oleh sebagian anggota masyarakat, khususnya generasi muda yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya menerima penyuluhan tentang bahaya dari penggunaan narkoba tersebut.⁶

⁶ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba* (cet. II; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005), h.16-17

2. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *kenakalan Remaja* mengatakan semakin banyaknya kebudayaan sebagai hasil dari semakin akrabnya komunikasi daerah, nasional, dan internasional. Keluluhan bermacam-macam budaya itu dapat berlangsung lancar dan lembut, akan tetapi tidak jarang berproses melalui konflik personal dan sosial yang hebat. Banyak pribadi yang mengalami gangguan jiwa dan muncul konflik budaya yang ditandai dengan keresahan sosial serta ketidakrukunan kelompok sosial. Sebagai akibat lebih lanjut timbul ketidak sinambungan, disharmoni, ketegangan, kecemasan, kerusuhan sosial dan perilaku yang melanggar norma-norma hukum formal.⁷
3. Menurut Ahmad Afif dalam bukunya *mengapa kami nakal* perkembangan dan pertumbuhan manusia sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi potensi yang dimiliki individu, khususnya yang berkaitan dengan masalah genetika. Faktor eksternal merupakan stimulus yang diterima oleh individu dan lingkungan dan turut mempengaruhi perkembangannya, seperti pendidikan, pola asuh, dan lingkungan sosial. Kecerdasan emosi seseorang juga dipengaruhi oleh kedua faktor-faktor tersebut seperti otak, keluarga dan lingkungan.
4. Menurut Dr. Siswanto Sunarso, S.H., M.H. dalam bukunya *penegakan hukum psikotroika* mengatakan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu

⁷Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja* (cet. 5; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),

pengetahuan, maka disamping menjamin ketersediannya, perlu juga dilakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap terhap psikotropika yang dapat merugikan khidupan manusia dan kehidupan bangsa Indonesia. Tindak pidana psikotropika menurut konvensi Wina 1988 sejauh ini telah diakomodasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Undang-Undang ini dipandang sebagai sarana hukum yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dari ancaman dan bahaya tindak pidana psikotropika tersebut.⁸

5. Menurut Wahyuni Ismail dalam bukunya *Remaja dan penyalahgunaan narkoba* mengatakan narkoba ialah zat yang menawarkan kenikmatan namun dibalik itu diam-diam boleh membunuh penggunanya. Jika selamat dari kematian efeknya boleh menimbulkan gangguan fungsi organ tubuh. Zat tersebut sering disalahgunakan sehingga menimbulkan ketagihan *addicton* sampai pada saat ketergantungan *dependence*. Manakala menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, mendefinisikan penyalahgunaan adalah penggunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) tanpa pengetahuan dan pengawasan dokter. Kecenderungan penyalahgunaan narkoba yang dimaksudkan ialah intensitas-intensitas diartikan sebagai usaha yang disadari untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Intensitas

⁸Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 11

merupakan indikasi kuatnya usaha individu dalam merencanakan dan mencoba melakukan perilaku.⁹

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas program rehabilitasi bagi Anak pengguna narkoba oleh Lembaga rehabilitasi LPAIC Kota Makassar. Sekaligus mengetahui faktor-faktor yang menghambat rehabilitasi terhadap Anak pengguna narkoba oleh Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang mempelajari ilmu Hukum khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, dan sebagai bahan pemikiran dan menambah kepustakaan di bidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan serta pemahaman pembaca maupun penulis mengenai masalah narkoba dan sebagai solusi bagi pengguna narkoba bagi BNN dan

⁹Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (cetI; Samata: PT. Alauddin University Press, 2014), h. 143

Lembaga lainnya yang mendirikan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna atau pecandu narkoba dari obat-obat terlarang. serta berbagai pihak yang memerlukan melakukan penelitian lebih lanjut tentang rehabilitasi bagi pengguna narkoba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Narkotika*

1. Defenisi Narkotika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (poerwadarminta, 1982), narkoba adalah akronim dari pada kata Narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga mrmiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan di dalam zat narkotika tersebut (Adisti, 2007). Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika, dan obat berbahaya lainnya (Supramono 2004).¹⁰

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Napza kerap disebut dengan istilah *Narkoba* yang merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan berbahaya lain. Sebenarnya, narkoba adalah senyawa-senyawa yang cukup banyak diperlukan didalam dunia kesehatan, industri, dan rumah tangga. Sebagian besar senyawa narkoba bersifat memengaruhi kerja sistem otak. Oleh karena itu, penggunaannya harus memenuhi aturan-aturan tertentu sebagaimana telah ditetapkan di dalam Undang-Undang kesehatan.

¹⁰Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (cetI; Samata: PT. Alauddin University Press,2014),h. 143

Adapun (QS. Al-Ma'idah/ 5: 91) yang menjelaskan tentang khamr.

إِنَّمَا الشَّيْطَانُ يُرِيدُ أَنْ يُوَقِّعَ بَيْنَكُمْ عَوَالِبَ غَضَا الْعَدَاوَةِ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ
عَنْوَ يَصُدُّكُمْ ذِكْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ اللَّهِ أَذْنُكُمْ فَهَلْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya :

“Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Makna dari ayat ini memberikan ketegasan tentang haramnya minum *khamr*, yaitu dengan mengatakan bahwa minum khamr itu adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Sebagaimana kita semua yakni, setan dan perbuatannya tidaklah patut untuk ditiru dan dilakukan oleh mausia yang beriman kepada Allah swt. (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 91)

Sebagaimana obat yang bekerja pada sistem saraf, pemakain narkoba dapat menimbulkan berbagai macam pengaruh, mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Pengaruh yang ringan, misalnya rasa mengantuk dan rasa santai. Pengaruh yang berat, misalnya pingsan, mabuk, dan bahkan mati. Oleh karena itu, narkoba tidak bisa dikonsumsi sembarangan tanpa sepengetahuan tenaga medis atau tenaga kesehatan.¹¹

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

¹¹Ida Listyarini Handyono, *Narkoba Perluah Mengenalnya* (cet. I; Bandung: PT. Pakar Raya, 2004), h. 1

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drugs*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹²

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat

¹²Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (cet. II; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005), h.16-17

narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof.Sudarto,S.H., dalam bukunya *kapita selekta Hukum pidana* mengatakan bahwa: perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.¹³

Menurut Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika. *Narcotic are drugs which product insensibillity or stuporduce to their deprecant ofter on the central nervous system, included in this definiton are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)*.Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan di karenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu (morphine, codein, methadone).¹⁴

Menurut Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang

¹³Djko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (cetI;PT. Bina Aksara 1987),h.480

¹⁴Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (cet. II; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005), h. 18

menghasilkan zat-zat obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan stimulant.¹⁵

Menurut George (1990) mengatakan narkoba merupakan zat kimia psikoaktif yang digunakan bukan untuk tujuan pengobatan yang mana penggunaannya adalah dilarang, yang menyebabkan pergantungan secara fisik dan psikologis. Mengikut Jamaluddin (2012) narkoba adalah bahan kimia yang mengakibatkan individu kehilangan akal pikiran, pedoman, jika narkoba itu disalahgunakan. Dapat dikatakan narkoba adalah zat atau bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan mental sehingga merusakkan kesehatan bahkan mengakibatkan kematian bagi yang menyalahgunakannya.

Sedangkan menurut Verdovende Middelen Ordonantie Staatblad 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai Undang-Undang obat bius narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.¹⁶

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. Narkotika

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika BAB I pasal I disebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat

¹⁶Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (cet. II; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005), h.19

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.¹⁷ Narkotika terdiri dari 3 golongan yaitu:

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putauw, kokain, ganja).

2) Narkotika Golongan II

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (contoh: Morfin, petidin).

3) Narkotika Golongan III

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (contoh: kodein)

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif

¹⁷Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika* (cetI; Samata: PT. Alauddin University Press, 2014), h. 151

pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997). Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, (contoh: ekstasi, shabu).

c. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah:

1) Minuman beralkohol

Mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan syaraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat itu dalam tubuh manusia.

2) Inhalasia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut)

Zat yang mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin. Yang sering disalahgunakan, antara lain: lem, thinner, penghapus cat kuku, bensin.

3) Tembakau

Pemakaian tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Pada upaya penanggulangan NAPZA di masyarakat, pemakain rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan NAPZA lain yang lebih berbahaya.¹⁸

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut:

a) candu (opium)

opium atau candu berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *papaver somniferum*. Bunga opium ialah merah, putih atau purple. Warna daunnya hijau tua terlihat berwarna keperak-perakan. Lebar daun 5-10 cm, panjang 10-25 cm. Permukaan daun tidak rata terbuka, melainkan berkeluk-keluk atau keriting. Getah yang semula berwarna putih susu itu setelah mengering berganti warna hitam-cokelat.

¹⁸Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (cetI; Yogyakarta : PT. Indoliterasi, 2016), h.173-177

Menurut penyelidikan para ahli farmasi serta berdasarkan suatu reaksi bouchardat dan meyer. Alkaloida itu merupakan zat hablur, endapan putih dan dapat larut di dalam alkohol. Alkaloida merupakan golongan racun khusus yang terdapat didalam tumbuh-tumbuhan, dan merupakan zat kimia basah yang terikat dengan asam. Kerja opium itu ialah resultante dari kerjanya alkaloida ini semua, tetapi morfin dan heroine mengambil peranan utama dan sangat berbahaya diantara obat-obatan itu semua.¹⁹

b) Kokain

Kokain adalah senyawa sintertis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokaian merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman *Erythoxylon coca*, yang berasal dari Amerika selatan, dimana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan “*efek stimulan*”. Saat ini kokaian masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk perbedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek *vasokonstriksif*-nya juga membantu. Kokaian

¹⁹Bp. Alda, Bp. Dharma Bakti, *Menanggulangi Bahaya Narkotika* (cet. I; Jakarta : PT. Dharma Bakti, 1985), h.27

diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif.²⁰

c) Ganja

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Pulau Jawa dan lain-lain. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap rasa makanan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan asapnya dihirup. Cara penyalahgunaannya adalah dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.²¹

d) Morfin

Morfin atau *Morphine* adalah salah satu bagian/zat terpenting dari candu dan ditemukan oleh seorang ahli farmasi bangsa Jerman bernama Seturner pada tahun 1805. Morphine adalah alkaloida yang terpenting dari candu dan menurut ilmu kimia mempunyai rumus dalam dunia

²⁰Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkotika* (cet. I; Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), h.19

²¹Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuh Penyalahgunaannya* (Cet. I; PT Gelora Aksara Pratama), h. 12

kedokteran morphine ini merupakan obat yang banyak dipakai, morphin diperoleh dengan jalan mengolah candu mentah secara kimiawi, sehingga zat morphine tadi terpisahkan. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang semakin lambat dan membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan.²² Morphine merupakan zat seperti bedak, poeder atau kapas, berwarna putih, rasanya pahit. Morphine berguna untuk hal berikut :

- (1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- (2) Menolak penyakit mejen (diarhe).
- (3) Batuk kering yang tak mempan codeine.
- (4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan
- (5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah menjadi kurang, maka keluarnya darah kurang pula.

²²Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika* (PT. Amanah R.I/B.P. Alda), h.33

(6) Sebagai obat tidur bila sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembek tak mampu membuat rasa kantuk (tidur)²³

e) Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman juga ini menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.²⁴

f) Shabu-shabu

Shabu-shabu adalah nama gaul dari narkoba. Shabu-shabu berbentuk kristal seperti gula pasir atau seperti vetsin (bumbu penyedap makanan). Setelah menggunakan shabu-shabu pemakai akan terlihat bersemangat, tetapi cenderung paranoid (ketakutan dan selalu curiga). Pemakai shabu-shabu tidak bisa diam, tidak bisa tidur karena cenderung terus beraktivitas, tetapi tetap akan sulit berfikir dengan baik.

g) Ecstasy (ekstasi)

Ekstasi adalah salah satu psikotropika yang dewasa ini cukup terkenal karena banyak diproduksi dan

²³Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. I; PT Indoliterasi), h.18

²⁴Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (Cet. I; PT Indoliterasi), h.24

disalahgunakan. Setelah memakai ekstasi, pengguna akan menjadi energik, tetapi matanya sayu, wajahnya pucat, berkeringat, tidak bisa diam (selalu bergerak), dan susah tidur. Efek negatif yang dapat timbul karena pemakaian ekstasi adalah kerusakan otak, dehidrasi (kurang cairan), gangguan lever, tulang dan gigi keropos, kerusakan saraf mata, serta tidak nafsu makan.²⁵

Dari uraian jenis-jenis narkoba atau tepatnya narkoba dan zat adiktif lainnya atau napza di atas, maka dapat disimpulkan bahwa narkoba atau napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok.

- a. Golongan narkoba (Golongan I); seperti opium, morphine, heroin.
- b. Golongan Psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis.
- c. Golongan zat adiktif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, whisky, dan lain-lain.²⁶

3. Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkoba

Berbagai faktor remaja menyalahgunakan baik yang berasal dari kondisi psikologis dan kondisi lingkungan sekitarnya. Siswanto (1993) mengemukakan ada beberapa faktor saling berkaitan sehingga remaja melakukan penyalahgunaan narkoba, yaitu :²⁷

²⁵Ida Listyarini, *Narkoba Perlukah Mengenalnya* (cetI; Yogyakarta: PT. Pakar Raya, 2004), h.39-40

²⁶Taufik Makaro, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkoba* (cetI; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005), h.24

²⁷Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahguna Narkoba* (cet. I; Samata : 2014) h.159

- a. Faktor kemudahan narkoba diperoleh. Pada hakikatnya narkoba telah dilakukan pengawasan yang ketat, namun realitasnya sampai juga kepada pengguna narkoba.
- b. Faktor khasiat narkoba, individu menyalahgunakan narkoba karena mengharapkan impaknya. Walaupun ramai penagih narkoba sebenarnya telah mengakui akibat buruk dan zaman yang diperoleh tetapi mereka berani mengambil resiko.
- c. Faktor individu, meliputi faktor kepripadian dan biologic mereka. Ketergantungan narkoba senang terjadi kepada kepribadian lemah yang tergolong berisiko tinggi dengan sifa-sifat seperti mudah putus asa, kecewa, mudah bosan, dan mengutamakan kenikmatan sesaat.
- d. Faktor lingkungan, persekitaran yang memberikan peluang.

Capuzzi (dalam furhmann,1990) mengatakan penyebab penyalahgunaan narkoba ada 2 :

- 1) Faktor sosial seperti pengaruh keluarga, afiliasi religious, pengaruh teman sebaya dan pengaruh teman di sekolah.
- 2) Faktor personal yang meliputi rasa inferior, rasa *curiosity*, petualangan dan dorongan impulsif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba secara lebih detail adalah :²⁸

- a. Faktor individu, bagi kebanyakan penyalahgunaan narkoba dimulai atau terdapat pada masa remaja, sebab remaja yang sedang mengalami

²⁸Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahguna Narkoba*, h. 162

perubahan biologi, psikologi maupun sosial yang pesat merupakan individu yang rentan untuk menyalahgunakan narkoba. Anak atau remaja dengan ciri-ciri tertentu mempunyai resiko lebih besar untuk menjadi penyalahguna narkoba. Ciri-ciri tersebut antara lain :

- 1) Cenderung memberontak dan menolak otoritas.
- 2) Cenderung memiliki gangguan jiwa lain (*comorbiditas*) seperti depresi, cemas, psikotik, keperibadian sosial.
- 3) Perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku.
- 4) Rasa kurang percaya diri (*low self-confidence*), rendah diri dan memiliki citra diri negatif (*low self-esteem*). Sifat mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif.
- 5) Mudah murung, pemalu, pendiam.
- 6) Mudah merasa bosan dan jenuh.
- 7) Keingintahuan yang besar untuk mencoba atau penasaran.
- 8) Keinginan untuk bersenang-senang (*just for fun*).
- 9) Kurang menghayati iman dan kepercayaannya.

b. Faktor lingkungan, faktor lingkungan meliputi faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik disekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Faktor keluarga terutama faktor orang tua yang ikut menjadi penyebab seorang anak atau remaja menjadi penyalahguna narkoba seperti:

- 1) Lingkungan keluarga, diantaranya komunikasi orang tua-anak kurang baik/efektif, hubungan dalam keluarga kurang

harmonis/disfungsi dalam keluarga, orang tua bercerai, berselingkuh atau kawin lagi, orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh, orang tua otoriter atau serba melarang, orang tua yang serba membolehkan (*permisif*) kurangnya orang yang dapat dijadikan model atau teladan dalam keluarga, orang tua kurang peduli dan tidak tauhu dengan masalah narkoba, tata tertib atau disiplin keluarga yang selalu berubah (kurang konsisten), kurangnya kehidupan beragama atau menjalankan ibadah dalam keluarga, orang tua atau anggota keluarga yang menjadi pemakai narkoba.

- 2) Lingkungan sekolah, yaitu sekolah yang kurang disiplin, sekolah yang terletak dekat dengan tempat hiburan dan penjual narkoba atau tempat terjadinya transaksi narkoba, sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, adanya siswa pengguna narkoba.
- 3) Lingkungan teman sebaya, seperti berteman dengan penyalahguna, adanya tekanan atau ancaman teman kelompok atau pengedar.
- 4) Lingkungan masyarakat/sosial, meliputi lemahnya penegakan hukum dan situasi politik, sosial dan ekonomi yang kurang mendukung.

c. Faktor narkoba, yakni mudahnya narkoba didapat dimana-mana dengan harga terjangkau, banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang

menarik untuk dicoba, khasiat farakologi narkoba yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat *euforia/stone/high/teler* dan lain-lain. Masalah penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai masalah serius terutama setelah inpres 6-17 nampak dalam seminar kriminologi ke-II 1972 yang menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai item seminar disamping masalah-masalah lain. Hasil seminar tentang masalah narkotika menyimpulkan pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Tentang sebab-musabab dan faktor pendorong timbulnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Mereka yang kecanduan narkotika antara lain terdorong oleh berbagai faktor yaitu:
- 2) Faktor pisik antara lain :
 - (a) Mencari kesenangan dan kegembiraan
 - (b) Mencarai inspirasi
 - (c) Melarikam diri dari kenyataan
 - (d) Rasa ingin tahu, meniru, mencoba dan sebagainya
- 3) Faktor sosial kultural antara lain :
 - (a) Rasa setia kawan
 - (b) Upacara-upacara kepercayaan adat
 - (c) Tersedia dan mudah diperoleh
- d. Faktor medik antara lain seseorang yang dalam perkembangan jiwanya mengalami gangguan, lebih cenderung untuk menyalahgunakan narkotika

misalnya, untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan diri, dan kecemasan.²⁹

4. Upaya pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui beberapa cara, seperti :

- a. Tindakan preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik disekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan obat-obat ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan narkoba.
- b. Tindakan represif (penindakan), yaitu menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum, yang dilakukan para penegak hukum atau aparat keamanan dibantu masyarakat. Jika masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.

²⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 24-25

- c. Tindakan kuratif (pengobatan), bertujuan penyembuhan para korban baik secara medis maupun dengan media lain. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitas pecandu narkoba seperti Yayasan Titihan Respati, pesantren-pesantren, yayasan pondok bina kasih dan lain-lain.
- d. Tindakan rehabilitatif (rehabilitas), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.³⁰

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Sebelum membahas tentang tindak pidana pencabulan terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian dari tindak pidana itu sendiri. Dimana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan kata “*Strafbaar Feit*” yang dikenal sebagai tindak pidana. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa

³⁰Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba* (cet I; Samata : 2014), h.303-304

yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaar feit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Vosmerumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari barat (Eropa) yakni: Menurut professor Pompe, perkataan "*starfbaar feit*" secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hokum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hokum dan terjaminnya kepentingan umum" atau sebagai *de normovertreding* (*vestoring der rechtsorde*), *waaran de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing is voor de handhaving der reccts orde en de behartiging van het algemeen welsijn*".³¹

Menurut *simons*, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari *simons*, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat

³¹P.A.F. Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cet. V; Jakarta: PT.Citra Aditia Bakti, 2013), h.181

dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam oleh pidana oleh Hukum,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan dengan seseorang dengan kesalahan (schuld)
- d. Seseorang dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya,
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

Berdasarkan pendapat dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang bertanggung jawab yang perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa “sanksi pidana”. Untuk membedakan suatu tindak pidana sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.³² Beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para pakar hukum dari Indonesia yakni:³³

1) Andi Hamzah

Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).

2) Moeljatno

Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

³²<http://artong.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses Selasa 07 November 2017 pukul 19:20 WITA

³³Sheila Masyita M, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut*, Fak.Hukum, Unhas, h.10

3) Wirjono Prodjodikoro

Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

a. Unsur subjektif, adalah unsure-unsur yang melekat pada diri sipelaku, atau yang berhubungan dengan sipelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana yaitu:³⁴

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud *ataubvoornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

³⁴P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum*, h. 192

b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana yaitu: ³⁵

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembentukan Undang-undang membedakan tindak pidana atas “kejahatan” dan “pelanggaran” tersebut berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh sungguh dan tindak pidana yang kurang sungguh-sungguh.³⁶ Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Yang secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik tersebut ada dua pendapat:

³⁵P.A.F Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum*, h.199

³⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (cet I : PT. Raga Grafindo Persada, Jakarta), h.5

1) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah:

- a) *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).
- b) *Wets delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

2) Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

- a) Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)
- b) Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

- c) Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
- d) Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- e) Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
- f) Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP).
- g) Delik tunggal dan delik berangkai (enkelvoudige en samenge-stelde delicten)

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika

memproduksi narkoba golongan I lebih dari 1 atau 5 kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang-Undang narkoba tersebut berkisar Rp. 1.000.000.00 sampai dengan Rp 10.000.000.000.00.

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Narkoba yang mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian korban yang telah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban narkoba adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jerah terhadap individu tersebut.

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkoba, maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang pidana, artinya, jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran, berdasarkan kitab Undang-Undang hukum pidana atau KUHP. Yaitu terdapat dalam buku II dan buku III yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana. Tujuannya adalah guna

melindungi kepentingan hukum yang dilanggar, kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis.

- a. Kepentingan hukum perorangan.
- b. Kepentingan hukum masyarakat.
- c. Kepentingan hukum negara.

Dalam sistematika KUHP perlu diperjelas tentang perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) pasal 104 s.d. 488 dengan pelanggaran (*overtredingen*) pasal 498 s.d. 569. Kejahatan menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur secara tertulis dalam ketentuan Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *Rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *Wetsdelicten*.³⁷

Untuk memahami rumusan hukum dari setiap tindak kejahatan dan pelanggaran, perlu diketahui asas-asas hukum pidana, beberapa asas penting adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana mempunyai 2 sifat

- 1) Formil

Dalam tindak pidana ini yang diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah perbuatannya.

³⁷Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika* (cet. II; Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005), h.42

2) Materil

Dalam jenis tindak pidana ini diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang adalah akibatnya.

b. Tindak pidana memiliki 2 unsur

1) Obyektif

Unsur ini terdiri atas suatu perbuatan atau suatu akibat.

2) Subyektif

Unsur ini adalah suatu kehendak atau tujuan yang ada dalam jiwa pelaku, yang dirumuskan dengan istilah sengaja, niat, dan maksud.

c. Tindak pidana terdiri atas

1) Tindak pidana dolus atau yang dilakukan dengan sengaja.

2) Tindak pidana kulpos atau yang dilakukan tanpa sengaja.

d. Tindak pidana mempunyai 3 bentuk

1) Pokok, dimana semua unsur dari tindak pidana dirumuskan.

2) *Gekwalifikasir*, disebutkan nama kejahatan disertai dengan unsur pemberatan, misal pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

3) *Geprivilegeer*, hanya dicantumkan nama kejahatan yang disertai unsur peringanan.

Dengan mengetahui masalah-masalah pokok di atas, maka akan lebih memperjelas dalam membahas bentuk-bentuk tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana narkoba yang merupakan kejahatan dan pelanggaran, kecuali itu, bahwa di sisi lain ada juga dikenal cara melihat kejahatan antara lain terletak pada:

- a. Cara perumusannya
- b. Cara melakukan tindak pidana
- c. Ada tidak hanya pengulangan atau kelanjutannya
- d. Berakhir atau berkesinambungannya suatu delik
- e. Apakah tindakan terlarang tersebut merupakan kebiasaan dari petindak atau tidak.
- f. Apakah pada tindak pidana itu ditentukan keadaan yang memberatkan atau meringankan.
- g. Bentuk kesalahan petindak.
- h. Apakah tindak pidana itu mengenai hak hidup Negara, ketatanegaraan atau pemerintahan Negara.
- i. Perbedaan subjek dan cara penuntutan.

D. *Rehabilitasi*

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.³⁸ Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik ataupun psikologisnya. Jadi arti umum rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena ada hal yang kemudian menjadi tidak

³⁸ Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

berfungsi atau rusak. Apabila dikaitkan dengan *disability* pengertiannya adalah pengembalian orang-orang cacat kepada kegunaan secara maksimal baik dalam aspek fisik, mental, personal, serta ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 9/1976 yang dimaksud dengan rehabilitasi (pasal 1 angka 30) adalah usaha memulihkan atau usaha untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniah, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya serta kepandaianya dalam lingkungan hidup. Untuk itu di perlukan upaya pengobatan yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh dan penyembuhan kerusakan mentalitas korban.³⁹

2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Istilah rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba terdiri dari 2 (dua) yaitu:

- a. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, sesuai dengan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- b. Rehabilitasi sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial dalam kehidupan bernasyarakat,

³⁹Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, (cet II; Bandung: 1990), h.122

sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁰

3. Tahap-Tahap Rehabilitasi

- a. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba.
- b. Tahap rehabilitasi non medis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh dibawah BNN adalah tempat tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (dua belas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
- c. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan

⁴⁰AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Cet1. Jakarta; Sinar Grafika, 2011), h. 74

sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada dibawah pengawasan.⁴¹

Proses ini dapat dilakukan melalui cara-cara berikut.

1. *Cold Turkey* (abrupt withdrawal) yaitu proses penghentian pemakaian narkoba secara tiba-tiba, tanpa disertai dengan substitusi antidotum.
2. Bertahap atau substitusi bertahap, misalnya dengan kodein, methadone, cpz, atau clocaril yang dilakukan secara tappoff (bertahap) selama 1-2 minggu.
3. Rapid detoxification, cara yang dilakukan dengan anestesi umum (6-12 jam).
4. Simtomatik, cara detoksifikasi yang dilakukan sesuai gejala yang dirasakan pemakai narkoba.⁴²
5. Tahap deteksi sekunder infeksi, pada tahap ini biasanya dilakukan pemeriksaan laboratorium lengkap dan tes penunjang yang lain. Tujuan tahap ini adalah untuk mendeteksi penyakit atau kelainan yang menyertai para pecandu narkoba. Contohnya, hepatitis (B/C/D), AIDS, TBC, jamur, serta sexual transmitted disease (penyakit menular seksual), seperti sipilis, GO, dan lain-lain.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan penyakit diatas, biasanya langsung dilakukan pengobatan medis, sebelum

⁴¹Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* (cetI;Yogyakarta: 2016), h.197-198

⁴²Ida Listyarini Handoyo, *Narkoba Perluah Mengenalnya* (cetI;Yogyakarta: 2004), h.47

pasien dikirim rumah rehabilitasi medis. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada para penderita yang lain atau tenaga kesehatan yang ada ditempat rehabilitasi.

6. Tahap rehabilitasi, biasanya dilakukan secara rawat inap, dalam jangka waktu 3 bulan sampai dengan 1 atau 2 tahun perawatan ini cukup memakan biaya. Yaitu biaya per orang kurang lebih 3-8 juta rupiah perbulan.
7. Tahap purnarawat, sebelum kembali ke masyarakat, para penderita yang baru sembuh akan ditampung disebuah lingkungan khusus. Biasanya lingkungan tersebut dibangun oleh swasta, jurnalis, kelompok agama.

4. Aturan tentang Rehabilitasi

Berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Mentri Kesehatan.⁴³ Meskipun demikian Undang-Undang ini juga memberikan kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah

⁴³Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta; Djambatan,2004), h. 192

atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan Menteri.

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat pulih kembali dan melaksanakan fungsi sosial dalam berkehidupan dalam masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial) dan rehabilitasi sosial dilakukan setelah rehabilitasi medis selesai.

Penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa undang-undang Narkoba dibuat dengan tujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial dan lebih jelas lagi dijelaskan pada pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba untuk di rehabilitasi. Namun pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang divonis hukuman penjara dari pada rehabilitasi. Padahal dalam pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memungkinkan Hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi. Dalam pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada

hakim dalam halo rang tersebut terbukti sebagai seorang korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bukan hanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saja tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi ini seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna kedalam Lembaga medis dan sosial, kemudian pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi lalu Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/501/2015 yang menunjuk 434 Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di 33 Provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini, peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Mengenai prosedur tetap dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan

putusan pengadilan. Maka dalam hal itu keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak bisa lagi dianggap main-main. Dengan begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi solusi pada permasalahan ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancar seperti yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan yang maksimal maka tujuan dibuatnya hanya dapat menjadi mimpi. Tata cara Pengajuan Permohonan Rehabilitasi Narkoba.

1. Pecandu Narkoba, dalam hal pecandu narkoba belum cukup umur, orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
2. Dalam hal pecandu narkoba sudah cukup umur, pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁴⁴ Pedoman teknis penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi.

⁴⁴Laman Web bnn.go.id, dilihat tanggal 5/6/2018

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka atau terdakwa sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Pengadilan diberikan perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi. Penentuan rekomendasi rehabilitasi ini berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Tata cara permohonan rehabilitasi, dalam konteks permohonan rehabilitasi dalam pengadilan, kami simpulkan bahwa permohonan ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Syarat permohonan telah disimpulkan kemudian setelah itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat meminta bantuan kepada tim Asesmen Terpadu setempat untuk melakukan Asesmen terhadap Terdakwa dan hasilnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Hakim dengan berita acara penyerahan rekomendasi hasil Asesmen.⁴⁵

Meskipun peraturan BNN 11/2014 pada dasarnya adalah pedoman teknis penyidik untuk memohon penempatan rehabilitasi kepada tersangka setelah dilakukan Asesmen Terpadu yang tata caranya berdasarkan peraturan BNN 11/2014

E. Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum adalah sebuah pencapaian dari aturan yang telah dibuat apakah aturan tersebut ditaati oleh responden atau target dari aturan itu.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum itu sendiri,

⁴⁵Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi*

maka yang pertama kita harus lakukan adalah mampu mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.⁴⁶ Apabila sebagian dari target dari aturan tersebut menaati aturan yang telah ditetapkan maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut sudah efektif. Seseorang yang menaati aturan atau tidak menaati suatu aturan maka tergantung pada keoentingannya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Ketiga macam kepentingan tersebut merupakan jenis-jenis ketaatan yang telah dikemukakan oleh H.C. Kelman dalam Buku *menguak teori hukum* (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence) yang telah dipermudah oleh Achmad Ali sebagai berikut:⁴⁷ Ketaatan yang bersifat *compliance*, yang artinya apabila seseorang menaati sebuah aturan hanya karena mereka takut mendapatkan sanksi. Kelemahan pada ketaatan jenis ini, karena mereka hanya membutuhkan pengawasan yang terus menerus.

- a. Ketaatan yang bersifat *identification*, yang artinya apabila seseorang menaati sebuah aturan tertentu, hanya karena takut hubungan baiknya mereka dengan pihak yang lain menjadi rusak.
- b. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yang artinya apabila seseorang menaati sebuah aturan tertentu, benar-benar karena mereka merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut dan melihat realitasnya, dapat dikatakan seseorang dalam menaati sebuah aturan hanya karena salah satu jenis

⁴⁶Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT prenada Media Group,2009), h. 375

⁴⁷Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT prenada Media Group,2009), h. 348

saja misalnya taat karena *compulsion* akan tetapi ada juga seseorang menaati sebuah aturan hanya dengan dua bahkan ketiga jenis ketaatan tersebut, dikarenakan aturan tersebut cocok dengan nilai-nilai yang diyakininya juga dapat menghindari sanksi aturan dan menjaga hubungan baiknya dengan pihak lain.

L. Pospisil (1971), menjelaskan lebih lanjut tentang ketaatan yang bersifat *internalization*.⁴⁸ *“internalization” of a rule of behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in which the individual either breaks the rule in the spur of the moment, without much thinking, or the consciously compromises a moral conviction for an immediate, and strong enough reward”*

Setelah melihat pendapat dari H.C. Kelman dan L Pospisil mengenai jenis-jenis ketaatan maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut akan tetapi dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang patuh akan peraturan dengan ketaatan yang bersifat ‘*compliance*’ atau ‘*identification*’ saja berarti walaupun banyak masyarakat patuh tetapi kualitas efektifnya masih rendah, akan tetapi banyaknya masyarakat yang patuh atau taat akan peraturan dengan sifat ‘*internalization*’ maka semakin tinggi kualitas efektifnya aturan hukum atau perundang-undangan itu.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa seseorang yang taat apabila mereka bersifat tindak atau berperilaku sesuai dengan harapan pembentukan hukum sebagaimana dipahaminya dengan mengutip pendapat Fest (Johannes Fest),

⁴⁸ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT Prenada Media Group, 2009), h. 348

Friedman menyatakan bahwa atas dasar hal-hal yang dinyatakan di atas maka kaitannya dengan pengaruh hukum sikap tindak atau perilaku yang dihasilkan dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*) ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*), dan pengelakan (*evasion*), konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan sebenarnya berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau perintah.⁴⁹ Apabila yang dibahas adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan terkait efektifnya suatu perundang-undangan banyak yang bergantung pada beberapa faktor antara lain:⁵⁰ Pengetahuan tentang isi dari Perundang-Undangan

- 1) Cara-cara untuk memperoleh sebuah pengetahuan
- 2) Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- 3) Proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesah-gesah demi kepentingan yang sesaat yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (Undang-Undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada umumnya, menurut Achmad Ali faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimalisasi pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi* (Cet II: Bandung; CV Bandung, 1985), h. 5

⁵⁰ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT Prenada Media Group, 2009), h. 378

menegakkan perundang-undangan tersebut. Akan tetapi seseorang menaati suatu peraturan perundang-undangan adalah terpenuhinya suatu kepentingan (*interest*) oleh perundang-undangan itu sendiri.

Bekerjanya perundang-undangan dapat ditinjau dari dua perspektif.⁵¹ Perspektif organisatoris, yang memandang perundang-undangan sebagai institusi yang ditinjau dari cirri-cirinya.

- 1) Perspektif Individu, atau ketaatan yang lebih banyak berfokus pada segi individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undnagan. Tidak efektifnya sebuah kebijakan atau aturan dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti:⁵² Mental dan moral aparat terkait belum memadai.
- 2) Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga seiring tergiur untuk bekerja sama dengan sedikit memperoleh uang.
- 3) Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah.
 - a) Profesionalisme yang kurang memadai.
 - b) Fasilitas atau peralatan yang masih kurang.
 - c) Buruknya koordinasi antar instansi.
 - d) Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

⁵¹ Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (PT prenada Media Group, 2009), h. 379

⁵² Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Cet. I; PT Gelora Aksara Pratama), h. 118

Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas maka dapat menarik pandangan bahwa integrasi sebagai penegak hukum maka perlu dijaga agar efektifitas pelaksanaan rehabilitasi berjalan secara maksimal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini menekankan segis-segi yuridis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

2. Lokasi penelitian

Agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat padapenulisan skripsi ini, penelitian tentang “EFEKTIFITAS REHABILITASI TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI KOTA MAKASSAR”(Studi kasus Rehabilitasi LPAIC Makassar). Dilaksanakan di daerah Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Makassar merupakan lokasi penelitian yang secara kuantitas jumlah pengguna narkoba di Kota Makassar tergolong sangat tinggi. Sehingga menarik niat penulis meneliti hal tersebut, selain itu agar penulis dapat memperoleh hasil yang objektif sesuai dengan tujuan penulisan skripsi yaitu untuk mengamati dan meneliti efektifitas rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba.

B. Metode pendekatan

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menitik beratkan Hukum sebagai kenyataan (*law in action*), merupakan ilmu sosial yang doktrinal dan bersifat empiris. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁵³

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer (*field research*) yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pihak Badan Narkotika Nasional dan pihak-pihak yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini
2. Data sekunder (*library research*) yaitu data yang diambil dari orang lain, pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Data ini merupakan data pendukung yang bersifat memperkuat dan memperjelas data primer seperti buku-buku, jurnal, media online, dokumen, karya ilmiah, media cetak, hasil-hasil penelitian dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, majalah, media, dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian.

⁵³V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Cet. I ;Yogyakarta: pustaka baru press,2014), h. 6

2. Penelitian lapangan (*Field research*), yaitu pengumpulan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

E. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrumen atau alat yang digunakan dalam memperoleh data di lokasi penelitian sebagai berikut:

Wawancara, yaitu dengan menggunakan wawancara dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan efektifitas rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba di kota Makassar. Dan menggunakan alat tulis, buku, hp untuk merekamnya dan alat bantu lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam kegiatan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi.⁵⁴ Adapun Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan cara sebagai berikut:

1. Data primer yang diperoleh melalui wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih saling berhadap-hadapan secara fisik.⁵⁵ yang dilakukan kepada para klien atau residen dan kepala lembaga yang berkaitan dengan objek penelitian.

⁵⁴Sitti Mania, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*, (Makassar:Alauddin University Press, 2013), h. 183

⁵⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Teori dan Praktik*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2015), h.81

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶
3. Observasi adalah metode paling dasar dan tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.⁵⁷

G. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif kemudian disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik satu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Penarikan analisis menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

⁵⁶Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. VII; Jakarta; Sinar Grafika, 2016), h.

⁵⁷Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Teori dan Praktik, h. 141.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Efektifitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk dihilangkan terutama di Makassar. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crimes*). Dalam perkembangannya masalah-masalah tentang narkotika semakin meningkat di Negara ini terutama di Kota Makassar. Bahkan permasalahan narkotika saat ini tidak lagi dalam keadaan sembunyi-sembunyi, tetapi pemakai maupun pengedar melakukan aksisnya secara transparansi.

Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang efektifitas rehabilitasi, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apakah Narkotika itu ? Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1). Permasalahan narkotika adalah permasalahan yang sangat kompleks dan sulit ditangani walaupun banyak upaya pemerintah untuk menindaki masalah tentang narkotika, mulai dari upaya preventif atau pencegahan sampai pada upaya represif atau penyembuhan, namun penyalahgunaan narkotika tidak hilang di Negara ini terkhusus di kota Makassar itu sendiri. Walaupun pengawasan pemerintah meningkat setiap tahunnya namun masih belum membuat efek jerah

bagi pengedar untuk mengedarkan barang haram itu. Adapun (QS.Al-Baqarah/2:219) yang menjelaskan tentang khamr :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS.Al-Baqarah/2:219)

Makna dari ayat ini maksudnya pada minuman keras dan berjudi itu terdapat (dosa besar). Menurut satu qiraat dibaca katsiir (banyak) disebabkan keduanya banyak menimbulkan persengketaan, caci-mencaci, dan kata-kata yang tidak senonoh, dan beberapa manfaat bagi manusia dengan meminum-minuman keras akan menimbulkan rasa kenikmatan dan kegembiraan, dan dengan berjudi akan mendapatkan uang dengan tanpa susah payah, tetapi dosa keduanya maksudnya bencana-bencana yang timbul dari keduanya lebih besar artinya lebih parah daripada manfaat keduanya. Hal tersebut terjadi karena banyaknya yang membutuhkan dan menjanjikannya keuntungan besar yang didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkoba itu sendiri. Namun dilihat dari keadaanya seiring dengan berjalannya waktu mengikuti zaman dan untuk hal itu juga banyak orang yang masih menggunakan narkoba, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak, hal tersebut mulai dari rasa keingintahuannya besar untuk mencoba-coba hingga demi mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang

dihadapinya. Sesuai data yang ada pada Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC).

Tabel 1
Perkembangan kasus yang ditangani LPAIC 2015-2018

Instansi	2015	2016	2017	2018	Jumlah
LPAIC	6	29	22	8	65

Sumber: Lembaga Rehabilitasi LPAIC Makassar 8 Juni 2018

Data diatas menunjukkan penurunan jumlah pengguna setiap tahunnya dan peran lembaga penegak hukum tidak tinggal diam dalam menangani peredaran gelap kasus narkoba yang dianggap tidak mudah menanganinya. Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum adalah kebiasaan kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari kebiasaan yang dilakukan dan melihat bahwa apakah sebuah kebijakan atau aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penjelasan tentang rehabilitasi narkoba itu sendiri terdiri dari dua jenis yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pengertian dari rehabilitasi medis itu sendiri dijelaskan pada pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”.

Sedangkan dalam Undang-Undang yang sama dijelaskan pada Pasal 1 butir 17 yang menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Dalam perkembangannya tujuan dari pada pemidanaan bukan hanya untuk memeberikan efek jera dan pembalasan semata melainkan dapat memberikan manfaat bagi korban maupun pelaku. Maka dari itu hadirlah tempat rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan menjalankan aktivitas mereka kembali dalam kehidupan bermasyarakat seperti sebelum mereka mengonsumsi narkoba.

Dengan hadirnya Institusi penerima wajib lapor rehabilitasi Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba yang biasa disebut sebagai klien harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali ke lingkungan masyarakatnya untuk beraktivitas layaknya belum pernah menggunakan narkoba. LPAIC menggunakan alur pelayanan rehabilitasi sebagai berikut:

1. Penerimaan klien atau residen

Pada alur ini klien harus diperiksa terlebih dahulu dengan cara tes skrinig urin, setelah tes urin lanjut cek up asesmen awal dan setelah asesmen pengenalan program kelengkapan

administrasi, pemeriksaan medis setelah itu penandatanganan persetujuan orang tua untuk klien direhabilitasi. Pada proses ini hanya memerlukan waktu 1 hari.

2. Program pemulihan

Pada alur ini ada beberapa proses yang harus dijalani klien atau residen, dimana klien akan mengikuti rehabilitasi sosial dengan metode Therapeutid Community (TC) dan beberapa metode lainnya. Disini klien atau residen diberikan kedisiplinan, pengenalan diri sendiri sesama anggota kelompok untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan asesmen memberikan pengenalan konsep pembelajaran materi-materi tentang bahaya narkoba dan materi motivasi hidup. Proses ini akan berjalan selama dua bulan, setelah klien atau residen menjalani proses tersebut, maka tahapan selanjutnya menjelang waktu selama 1 bulan atau 2 bulan masuklah program *middle peer*, pada proses ini klien akan melakukan pemantapan kedisiplinan diri, peningkatan rasa percaya diri dalam anggota kelompok dan kemampuan berkomunikasi, pemantapan pola hidup sehat, pemberian peran dan tugas dalam ikatan kelompok menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, pemantapan pengendalian diri. Pada proses ini residen menjalani selama 1 bulan. Proses terakhir pada tahapan *family support* dimana klien atau residen dipertemukan dengan keluarganya tapi tetap dalam pengawasan, menjelang 3

sampai 4 bulan kembali difungsikan *terapy community* (TC) selama proses pemulihan. program pemulihan ini dilakukan selama kurung waktu 6 bulan.

3. Pendampingan pasca rehabilitasi

Pada alur ini residen tinggal di rumah dampingan dengan sesama residen paling banyak berjumlah 10 orang yang didampingi oleh konselor atau pekerja sosial atau tenaga medis yang biasa disebut sebagai rawat jalan. Pada tahap ini dilakukan sampai sembuh total.

4. Vokasional esensi

Pada alur ini rehabilitasi berkelanjutan dan memberdayakan keterampilan klien atau residen untuk bekerja dan berpenghasilan, residen juga diperbolehkan dikunjungi keluarganya yang dapat dilakukan sewaktu-waktu bahkan residen dapat pulang menginap bersama keluarganya tapi tetap dalam pantauan konselor atau biasa disebut rumah damping dimana klien atau residen diberikan pelatihan sesuai minat dan bakat yang ada dalam dirinya yang biayanya ditanggung oleh pemerintah, BNN, Kemensos untuk dipekerjakan. Pada tahap ini dilakukan selama 2 bulan.

5. Pembinaan berkesinambungan

Pada alur ini rehabilitasi berkelanjutan dan membina klien dalam komunitas bantu diri keseluruhan dari program. Pada tahap ini dilakukan selama 3 bulan.

Jika diakumulasikan maka klien atau residen akan menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Residen juga diharuskan melaksanakan semua tahapan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan semua klien atau residen menjalani rehabilitasi selama enam bulan. Hal ini juga dikemukakan oleh bapak Fauzi selaku konselor dalam wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 9 juni 2018 pukul 13.38 di Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) yang menyatakan bahwa:

“Semua klien atau residen harus menjalani semua tahapan rehabilitasi dan itu dijalankan selama enam bulan ada juga yang lebih, tergantung hasil *asesment* dan bahkan dilakukan sampai klien sembuh total tergantung dari kemauan orangnya untuk sembuh”.

Selain program rehabilitasi, Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) juga memiliki program kerja Divisi rehabilitasi, dimana pada program ini LPAIC membagi dua divisi, yakni pelayanan kesehatan mental (psikologis) dan pelayanan kesehatan fisik (medis) yang harus dijalankan oleh klien adalah:

1. Pelayanan kesehatan mental (psikologis)

- a. Tahap Home “Therapeutic (TC) atau Komunitas Terapi”, pada tahap ini Terapi berbasis komunitas merupakan salah satu jenis model terapi dimana yang berperan menjalankan terapi adalah komunitas pecandu itu sendiri jadi dari pecandu, oleh pecandu, dan untuk membantu pecandu. TC merupakan sekelompok orang yang mempunyai masalah yang sama dan

mereka berkumpul untuk saling membantu dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, atau dengan kata lain disebut “*Men Helping Man To Help Him Self*” yaitu seseorang menolong orang lain untuk menolong dirinya sendiri. Para pecandu diajarkan untuk bersosialisasi terhadap sesama residen lainnya.

Pada tahap ini klien diajarkan tentang kedisiplinan, ketaatan pada pemimpin dan di dalamnya diajarkan kerja tim yang baik (misalnya: kerja bakti, dll). Tahap ini dilakukan residen selama dua minggu.

- b. Tahap Psychotherapy/Konseling Pribadi, pada tahap ini pengobatan dilakukan untuk residen yang memiliki gangguan mental dengan metode tertentu yang ilmiah dan sudah terbukti berhasil. Psikoterapi bisa membantu mengatasi hampir semua masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan dan perilaku.

Efek dari narkoba mengakibatkan gangguan mental perilaku akibat penyalahgunaannya. Pada tahapan ini klien diarahkan supaya bisa membantu mengatasi hampir semua masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Tahap ini akan dijalani oleh residen selama dua bulan.

- c. Tahap Hypnotherapy atau Hipnoterapi, pada tahap ini penyembuhan dalam kondisi kesadaran khusus dimana pikiran berada dalam kondisi sadar sepenuhnya, dimana posisi residen baring terlentang rileks. Pada tahapan ini klien diarahkan supaya

pikirannya terbawa menjadi sangat reseptif dalam menerima berbagai sugesti atau pesan mental untuk perubahan. Tahap ini akan dijalani oleh residen selama empat minggu.

- d. Tahap Smart Educaction atau Edukasi Cerdas dan tes-tes psikologi, ada tahap ini dengan adanya tes psikologi untuk mengenal karakter atau kepribadian seseorang mengetahui potensi diri pada residen. Kegiatan pada tahap ini klien diarahkan sederhana untuk mempelajari perubahan perilaku dan kepribadian seorang pecandu akibat gangguan psikologis yang menyertai perilakunya (misalnya: emosional, bohong, malas, dll).
- e. Tahap Group Counseling atau Konseling Kelompok, pada tahap residen diarahkan untuk lebih percaya diri dan belajar berbagi dengan sahabat juga lingkungan sekitarnya, dan belajar keterampilan untuk mengaktifkan kerja otaknya serta mengeluarkan unek-unek sehingga beban terasa lebih ringan. Kegiatan pada tahap ini diarahkan dengan tujuan terapi untuk meningkatkan identitas diri, menyalurkan emosi, dan membagi perasaan antar sesama didalam kelompok terapis, meningkatkan keterampilan hubungan sosial, dan meningkatkan kemampuan hidup mandiri (vokasional).
- f. Tahap Family Support atau motivasi Keluarga, pada tahap ini ditekankan pada proses terapi untuk kalangan anggota keluarga dari para pecandu narkoba tersebut, sehingga keluarga dan juga

residen dapat pulih dari masa lalu yang kelam serta mengalami pemberesan diri dan pendamaian antara residen dengan keluarganya ditambah dengan orang-orang yang pernah merasa dekat dihatinya untuk saling memaafkan dan mengampuni. Kegiatan pada tahap ini tidak lagi didampingi konselor atau tenaga medis setiap hari melainkan dua kali seminggu saja, dengan catatan akan diadakan tes urine secara berkala.

- g. Tahap Culture Therapy atau Terapi Budaya pada tahap ini orang tua dibekali agar dapat mengubah pola interaksi keluarga sehingga bisa membenahi masalah-masalah dalam keluarga dengan cara mengajarkan budaya etika atau kesopanan dalam keluarga dan belajar meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dengan kesantunan dalam berbicara, bertindak, dan bersikap. Kegiatan pada tahap ini diarahkan sehingga ketika residen keluar dari rehabilitasi dapat merasakan kenyamanan dan kehangatan keluarga yang selama ini residen rindukan.
- h. Tahap Music Therapeutic atau terapi musik, pada tahap ini usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk kesehatan fisik dan mental dan Mengajarkan residen yang sudah memiliki talenta memainkan musik secara langsung yang bermanfaat untuk menyeimbangkan

kembali otak kanan dan kiri. Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada pemberian keterampilan sesuai dengan bakat dan minat, praktek sesuai keterampilan yang diberikan dan integrasi sosial dengan masyarakat sekitar.

- i. Tahap Terapi Spiritual dan Terapi Moral, Kedua tahap ini berjalan secara bersamaan dengan konsep baik dan buruk yang diajarkan oleh agama. Pembimbing agama melakukan terapi setiap hari kepada residen dalam rehabilitasi, hubungan manusia dengan Tuhannya (Sholat, mengaji, dll untuk residen yang beragama Islam, dan saat teduh baca Al-kitab bagi residen yang beragama Kristen).

Kegiatan pada tahap ini diarahkan pada pendekatan agama dan moral yang menekankan tentang dosa atau kelemahan individu pada lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan moralitas ditempat asalnya.

- j. Tahap Sosial Care atau Peduli Sosial, pada tahap ini mengarahkan perilaku yang menyimpang ke arah perilaku sosial yang lebih layak dan disini diajarkan peduli terhadap sesama yang membutuhkan, para pecandu diajarkan untuk bersosialisasi terhadap sesama residen lainnya atau ketika residen sudah mampu dipercaya untuk keluar ke masyarakat luas. Kegiatan pada tahap ini diarahkan oleh konselor kepada hal-hal yang bersifat positif seperti kepedulian dan

kebersamaan tanpa membeda-bedakan status sosial, suku, agama, dan ras.

- k. Tahap Natural Tgerapy atau terapi Alam, pada tahap ini digabungkan dengan terapi musik, terapi keluarga atau dikondisikan dengan *Hipnoterapy* yang dilakukan seminggu sekali. Kegiatan pada tahap ini residen berada didalam ruangan bernuansa alam melakukan meditasi seperti mendengarkan musik yang lembut bersenandung diiringi bunyi air laut, angin, dan dilengkapi dengan lilin menyala dengan wangi aromaterapi yang menenangkan atau residen yang bersentuhan langsung dengan alam (Outhing). Pada tahap ini dilaksanakan tiga bulan sekali.

2. Pelayanan kesehatan fisik (medis)

Detoksifikasi herbal dan susu

- a. Olahraga, senam, fitnes pada tahap ini residen menjalani

olahraga dimana residen senam otak, senam ringan dan senam edukasi.

- b. Perawatan medis

- 1) Vitamin + obat-obatan standar
- 2) Pemeriksaan chek-up dini organ tubuh
- 3) Pemeriksaan VCT HIV-AIDS
- 4) Perawatan rumah sakit

Berdasarkan jenisnya narkotika telah terbagi dari tiga golongan sesuai tingkat ketergantungan. Jika dilihat dari jenisnya, ada beberapa

jenis narkoba yang paling sering dikonsumsi. Adapun jenis narkoba yang paling sering digunakan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Jumlah Residen Berdasarkan Zat yang di Pakai

No	Jenis Zat	Jumlah Residen			
		2015	2016	2017	2018
1	Shabu	6	26	19	3
2	Tramadol	2	7	9	2
3	Ganja	-	1	3	1
4	Somadri	1	1	3	1
5	THD	-	4	5	1
6	Sintek	-	-	1	-
7	Alkohol	-	6	5	-
8	Lem Fox	-	2	3	7
9	>1 Zat	2	12	17	6
Jumlah		11	59	65	21

Sumber: Lembaga Rehabilitasi LPAIC Makassar 13/Juni/2018

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa narkoba jenis shabu merupakan salah satu jenis zat yang paling banyak digunakan. Selain itu jumlah pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengonsumsi lebih dari 1 zat juga sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa masih banyak orang yang tertarik untuk menggunakan narkoba.

Seperti yang kita ketahui bersama, narkoba seharusnya dapat menjadi salah satu obat yang bermanfaat untuk kesehatan jika dikaji dari segi medis. Namun seiring keberadaannya narkoba saat ini tidak hanya

menjadi obat melainkan menjadi salah satu masalah yang tidak ada habisnya. Banyaknya element yang terlibat dalam peredaran narkotika yang menjadikan sulit untuk diberantas, tidak hanya warga asing yang menjadi pengedarnya bahkan tidak jarang juga aparat Negara yang melakukan transaksi pengedaran ataupun sebagai pemakai. Pada perkembangannya korban penyalahgunaan narkotika semakin tahun semakin meningkat dan tidak lagi memandang umur orang tersebut. pasien pengguna narkotika dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah penyalahguna narkoba di LPAIC Makassar berdasarkan kelompok usia

No	Kelompok Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	>10	10	-	10
2	10-15	28	-	28
3	16-21	13	-	13
4	22-27	5	-	5
5	28-33	4	-	4
6	>34	5	-	5
Jumlah		65	-	65

Sumber: Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) Makassar

20 Juni 2018

Pada Lembaga Rehabilitasi LPAIC Makassar menunjukkan data dimana usia 10-15 Tahun masih terhitung

terbanyak dari usia lainnya. Penggunaan narkoba yang berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan pada si pemakai sehingga pecandu tersebut tidak mudah lepas dari penggunaan narkoba. Pecandu berdasarkan pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.”

Sedangkan ketergantungan pada suatu narkoba terdapat dalam pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Dalam permasalahan narkoba, yang paling diperlukan adalah peran keluarga terhadap perkembangan seorang Anak sehingga menjadi tolak ukur terhadap individu-individu yang terjerumus dalam permasalahan narkoba. Keluarga seharusnya menjadi hal yang paling penting dalam pencegahan dan pengawasan dalam menggunakan narkoba. Karena pengawasan dari orang tua tentunya dapat membatasi gerak dari Anak ataupun anggota keluarga lain supaya tidak terjerumus dalam permasalahan narkoba. Namun, ada pula orang yang menggunakan narkoba ini berawal pada permasalahan keluarga, mulai terjadi pada orang tua yang kurang

perhatian kepada anak sehingga memilih menggunakan narkoba agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya.

Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan dua hal, yakni bagi para pengedar menjanjikan keuntungan besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketentraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkoba itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Jumlah klien atau residen yang ada di Lembaga rehabilitasi LPAIC Makassar sesuai tingkatan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Jumlah penyalahguna narkoba di LPAIC Makassar
berdasarkan tingkat pendidikan

NO	KELOMPOK USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SD	13	-	13
2	SMP	21	-	21
3	SMA	7	-	7
JUMLAH		41		41

Sumber: Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) 20 Juni

2018

Berita tentang kasus peredaran gelap narkoba itu sendiri, hingga narkoba itu tidak memandang status seseorang, baik itu Anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar maupun Anak yang sudah duduk di Sekolah menengah atas atau Anak yang belum berpenghasilan yang dikategorikan sebagai pelajar. Hal ini membuktikan bahwa narkoba tidak memandang apapun status seseorang.

Data diatas menunjukkan peredaran gelap narkoba merambah pelajar atau anak dibawah umur. Ini membuktikan bahwa cenderung pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bermotif coba-coba diperjelas oleh salah satu klien atau residen yang diwawancarai oleh penulis sendiri mengatakan:

“Pada awalnya saya hanya mencoba ketika ditawarkan oleh salah seorang namun rasa penasaran saya untuk mencoba sangat tinggi jadi akhirnya saya terjerumus satu kali mencoba, kemudian esok lagi dan akhirnya saya ketagihan barang itu.”

Penyalahgunaan narkoba seharusnya dapat diberantas, namun karena permasalahannya sangat kompleks yang disebabkan oleh beberapa faktor sehingga upaya penanganan yang dapat dilakukan yaitu dengan upaya komprehensif dan terpadu. Penyebaran informasi yang tepat akan bahaya narkoba dan penyuluhan adalah salah satu upaya pencegahan yang dapat ditempuh untuk memberantas narkoba pada pembahasan ini penulis akan menguraikan faktor-faktor apa saja yang membuat seseorang dapat mengonsumsi narkoba. Terdapat 5 faktor pendorong orang mengonsumsi narkoba:

a. Faktor keluarga

Dalam suatu keluarga seringkali mengalami masalah yang berakibatkan seseorang mengalami frustrasi atau orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarga. Sehingga anak tersebut mencari jalan untuk mencari perhatian kepada orang tuanya dengan cara mengonsumsi narkoba. Hal ini terjadi karena seorang anak cenderung memiliki tingkat emosi yang labil sehingga dalam mengambil keputusan, dia tidak mempertimbangkan baik buruknya terlebih dahulu yang pada akhirnya akan berdampak besar pada kehidupannya. Untuk itu pengawasan dan perhatian dari orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak.

b. Faktor coba-coba

Orang yang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan serta aturan hukum yang melarang menyalahgunakan narkoba. Pada kondisi ini, pecandu menggunakan narkoba karena berdasar rasa ingin tahu yang tinggi, meskipun telah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penggunaannya. Biasanya orang yang berada pada situasi ini adalah remaja atau anak-anak yang masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi.

c. Faktor lingkungan

Dimana remaja tidak hanya hidup dilingkungan keluarga ataupun sekolah melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan anak muda sekarang ditambah dengan berkurangnya

moral dari generasi muda sehingga ada peluang seseorang terjerumus menggunakan narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Terlebih lagi rasa persatuan yang tinggi dalam suatu kelompok menjadikan seseorang diharuskan melakukan apa yang dilakukan anggotanya atau biasa dikatakan satu rasa. Oleh karena itu, kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

d. Faktor ketidaktahuan

Walaupun tindak pidana narkoba hal yang harus diberantas namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni faktor ketidaktahuan ini yang tidak sedikit orang alami. Pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap narkoba menjadi dasar faktor yang menjadikan seseorang terjerumus menggunakan narkoba, namun ketidaktahuannya itulah yang pada akhirnya mengalami ketergantungan.

e. Faktor Ekonomi

Pada faktor ini, seseorang yang terjerumus menggunakan narkoba yaitu seseorang yang berada pada tingkat ekonomi yang rendah sampai tinggi. Terkhusus bagi orang yang memiliki kondisi ekonomi yang rendah biasanya menggunakan narkoba karena tidak sanggup lagi menahan beban hidupnya yang sulit. Narkoba dijadikan sebagai pelarian untuk melupakan semua permasalahannya. Sedangkan bagi orang yang memiliki ekonomi yang tinggi dapat dengan mudah untuk membeli narkoba

semaunya. Dengan begitu banyaknya peredaran narkoba maka dengan mudah orang tersebut memperolehnya. Sehingga ekonomi tinggi dan rendah juga memiliki peluang yang tinggi untuk mengonsumsi narkoba.

B. Faktor-faktor yang menghambat rehabilitasi yang dilakukan LPAIC

Makassar

Dalam prosedural yang dilakukan Lembaga Peduli Anak Indonesia Cerdas (LPAIC) melakukan rehabilitasi dengan melakukan program kerja divisi yakni pelayanan kesehatan mental dan pelayanan kesehatan fisik yang dilakukan sampai klien atau residen dengan tujuan menyembuhkan gejala bukan mengobati segala sumber penyakit sampai betul-betul pulih dan bisa kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam permasalahan yang sering terjadi dalam menjalankan program rehabilitasi terkendala baik dalam bidang anggaran maupun fasilitas rehabilitasi yang tidak memadai. Seperti halnya yang diungkapkan Ibu Voni selaku perawat dan acesor pada sela wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 22 Juni 2018 tepat pukul 14.00 WITA di LPAIC Makassar, Ibu Voni menyatakan bahwa:

“Sebenarnya yang membuat kami terhambat atas pelaksanaan rehabilitasi adalah persoalan anggaran ataupun fasilitas, karena semua biaya rehabilitasi ditanggung pemerintah. Meskipun biaya semuanya ditanggung pemerintah namun itu masih saja menghambat karena kurangnya fasilitas yang membuat program kerja rehabilitasi tidak berjalan maksimal.”

Mendengar pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang terjerumus dalam peredaran gelap narkoba

belum mampu diatasi sepenuhnya dengan mengandalkan fasilitas pada lembaga rehabilitasi yang terbatas. Namun demikian upaya untuk menanggulangi hal tersebut cara saat ini hanya bisa dilakukan adalah rawat jalan atau rumah dampingan.

Untuk wilayah Makassar sendiri bukan hanya Lembaga rehabilitasi LPAIC yang dapat melakukan rehabilitasi, rumah sakit maupun puskesmas yang seharusnya dapat melakukan rehabilitasi namun kembali lagi terhalang oleh sumber daya manusia. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Eldy Yunita pada saat peneliti melakukan wawancara pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 14.00 WITA di Lembaga rehabilitasi LPAIC Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar, beliau mengatakan bahwa:

“Bukan hanya ditempat ini yang bisa melakukan rehabilitasi, tapi rumah sakit dan puskesmas juga bisa melakukan rehabilitasi. Tapi itupun berjalan atau tidak karena lagi-lagi terhalang sumber daya manusia bahkan kalau rumah sakit biasanya akan bilang untuk mengurus pasien saja sudah banyak jadi klo pecandu biar tempat rehabilitasi saja yang urus. dan alhamdulillah sekarang Lembaga kami sudah bekerja sama dengan Kemensos.”

Jadi dapat menarik kesimpulan bahwa masyarakat juga dapat membantu dalam hal melaporkan anak atau keluarga maupun orang yang mereka ketahui menggunakan narkoba, sehingga masyarakat dapat juga berperan aktif dalam mengurangi tindak pidana narkoba. Peran serta masyarakat ini diatur pada BAB XIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Bahkan orang tua atau wali dari pecandu dapat melaporkan keluarganya sesuai dengan ketentuan pasal 55

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bahkan bagi orang tua yang mengetahui anak atau keluarganya menggunakan narkotika tetapi tidak melaporkannya maka orang tua atau wali tersebut diancam pidana sesuai dengan ketentuan pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Orang tua atau wali dari pecandu belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah).”

Setiap orang dianggap tahu apabila setiap aturan yang telah dituangkan dalam sebuah Undang-Undang Negara dan hukum bersifat memaksa. Namun ada baiknya apabila semua masyarakat benar-benar mengetahui program rehabilitasi ini dan bukan hanya dianggap tahu tentang hal tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan cara penyuluhan atau

sosialisasi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait. Tentunya peranan pemerintah sangat dibutuhkan baik berupa anggaran, sistem maupun pengawasan. Karena suatu kebijakan tidak akan terlaksana dengan maksimal apabila tidak didukung anggaran yang memadai, sistem yang benar dan pengawasan yang tidak maksimal. Hidupkan kesadaran bahwa kesehatan adalah hal yang paling mahal di dunia ini, bukan orang lain tapi diri kita yang mampu menjaga dengan menggunakan niat yang baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba oleh Lembaga Rehabilitasi LPAIC Makassar sudah berjalan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun disisi lain, tidak menutup kemungkinan kekurangan itu selalu ada dalam menjalankan aturan tersebut.
2. Hambatan LPAIC Makassar dapat dituangkan dalam tiga poin penting yaitu: Faktor internal Lembaga, eksternal lembaga dan faktor individual klien atau residen.

B. Saran

1. Peran dari berbagai pihak pun terutama orang tua sangat diperlukan untuk mengawasi perkembangan pertumbuhan anggota keluarganya agar tidak terjerumus barang haram tersebut. Karena setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi meningkatnya korban dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Pada dasarnya efektifitas rehabilitasi dalam proses pemulihan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sudah sangat efektif, hal ini dapat dipertahankan untuk kedepannya dalam menyembuhkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Untuk mendukung hal tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah terkait dengan bantuan anggaran maupun untuk sarana dan prasarana dalam proses rehabilitasi untuk

pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba supaya berjalan dengan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, PT prenada Media Group, 2009.
- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta; Sinar Grafika, 2011.
- Bp. Alda, Bp. Dharma Bakti, *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta PT. Dharma Bakti, 1985.
- Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba* Yogyakarta PT. Indoliterasi, 2016.
- Djko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, PT. Bina Aksara 1987.
- Edi Warsidi, *Mengenal Bahaya Narkoba*, Jakarta Timur PT Grafindo Media Pratama, 2006.
- Ibrahim Hikma Edrisy, *Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalaguna Narkotika*, Lampung, 2016.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* Jakarta; Djambatan, 2004.
- Ida Listyarini Handyono, *Narkoba Perlukah Mengenalnya* Bandung PT. Pakar Raya, 2004.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2015.
- Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, PT. Raga Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, H. Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2005.
- P.A.F. Laminatang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Citra Aditia Bakti, 2013.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi*

Redaksi Badan Penerbit Alda Jakarta, *Menanggulangi Bahaya Narkotika* (PT. Amanah R.I/B.P. Alda.

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sheila Masyita M, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Secara Berlanjut*, Fak.Hukum, Unhas.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1990.

Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi* , Bandung;CV Bandung,1985.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, PT Gelora Aksara Pratama.

Sitti Mania, *Metodologi penelitian pendidikan dan sosial*, Makassar:Alauddin University Press, 2013.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001.

V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: pustaka baru press,2014

Wahyuni Ismail, *Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, Samata PT. Alauddin University Press,2014.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 43/HUK/2018

Karya Ilmiah menyangkut permasalahan yang ada.

Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna Kedalam Lembaga Medis dan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html?m=1>, diakses Selasa 07 November 2017 pukul 19:20 WITA

Laman Web bnn.go.id, dilihat Selasa 5/6/2018 pukul 21:20 WITA



RIWAYAT HIDUP



Harullah lahir di Ujung Pandang pada tanggal 21 Januari 1996 yang merupakan anak Bungsu dari pasangan bahagia dari ayahanda Harifuddin dan Ibunda Harlina serta tinggal di sebuah Desa kecil yang bernama Lakkang. Penulis memulai jenjang pendidikan formal mulai dari SDN Lakkang Kec. Tallo dan lulus pada tahun 2008. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah pertama yakni di SMPN 31 Makassar dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang menengah atas di SMAN 6 Makassar dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan mendaftar di UIN Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Sayri'ah dan Hukum dan sedang menyelesaikan studinya tahun 2018 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H). Selama kuliah, penulis aktif dalam berorganisasi. Yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Priode 2016/2017 dan mengambil jabatan pada bidang Apokasi.